IMPLIKASI PASANGAN CALON TUNGGAL TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BREBES



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

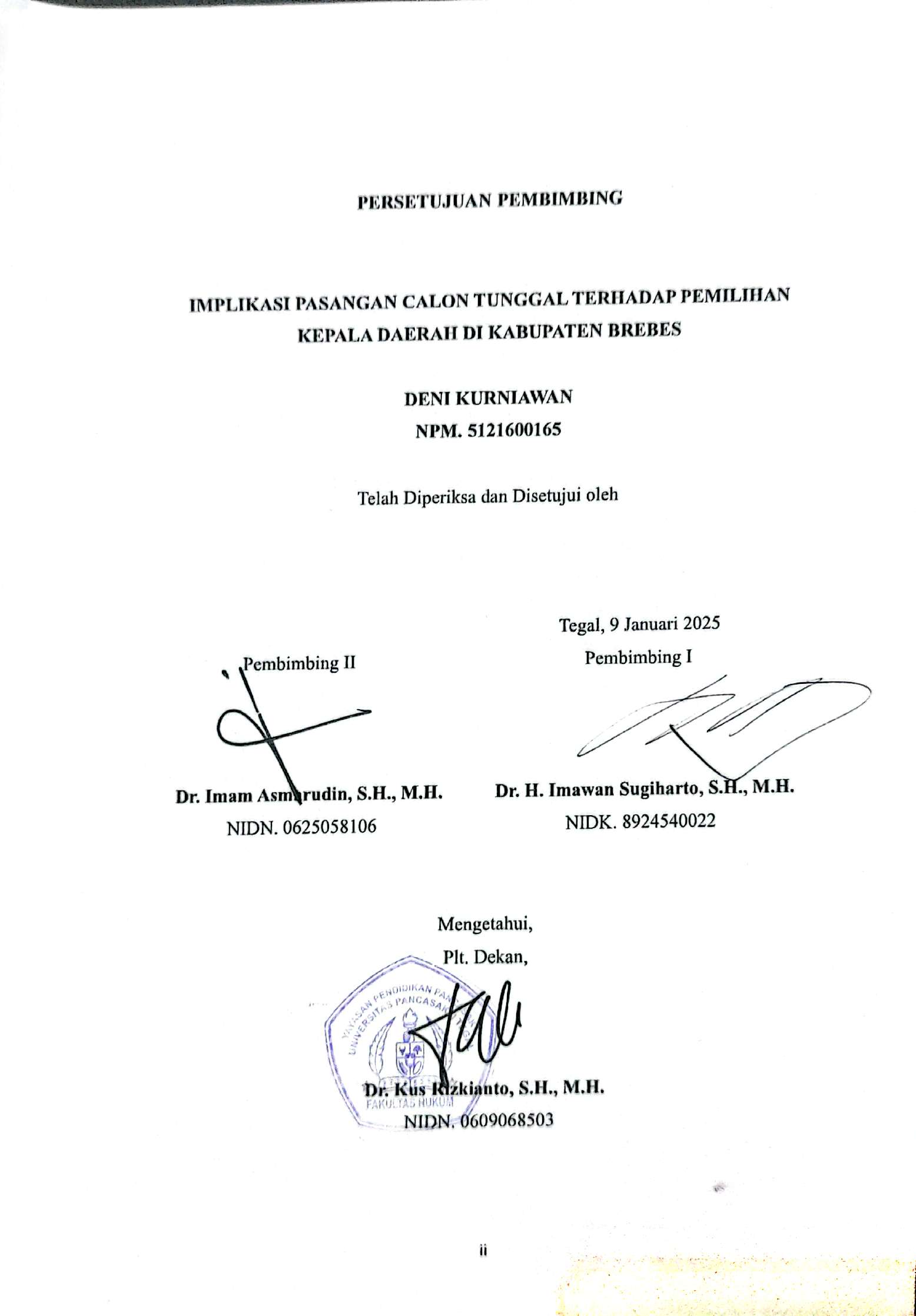
**DENI KURNIAWAN**

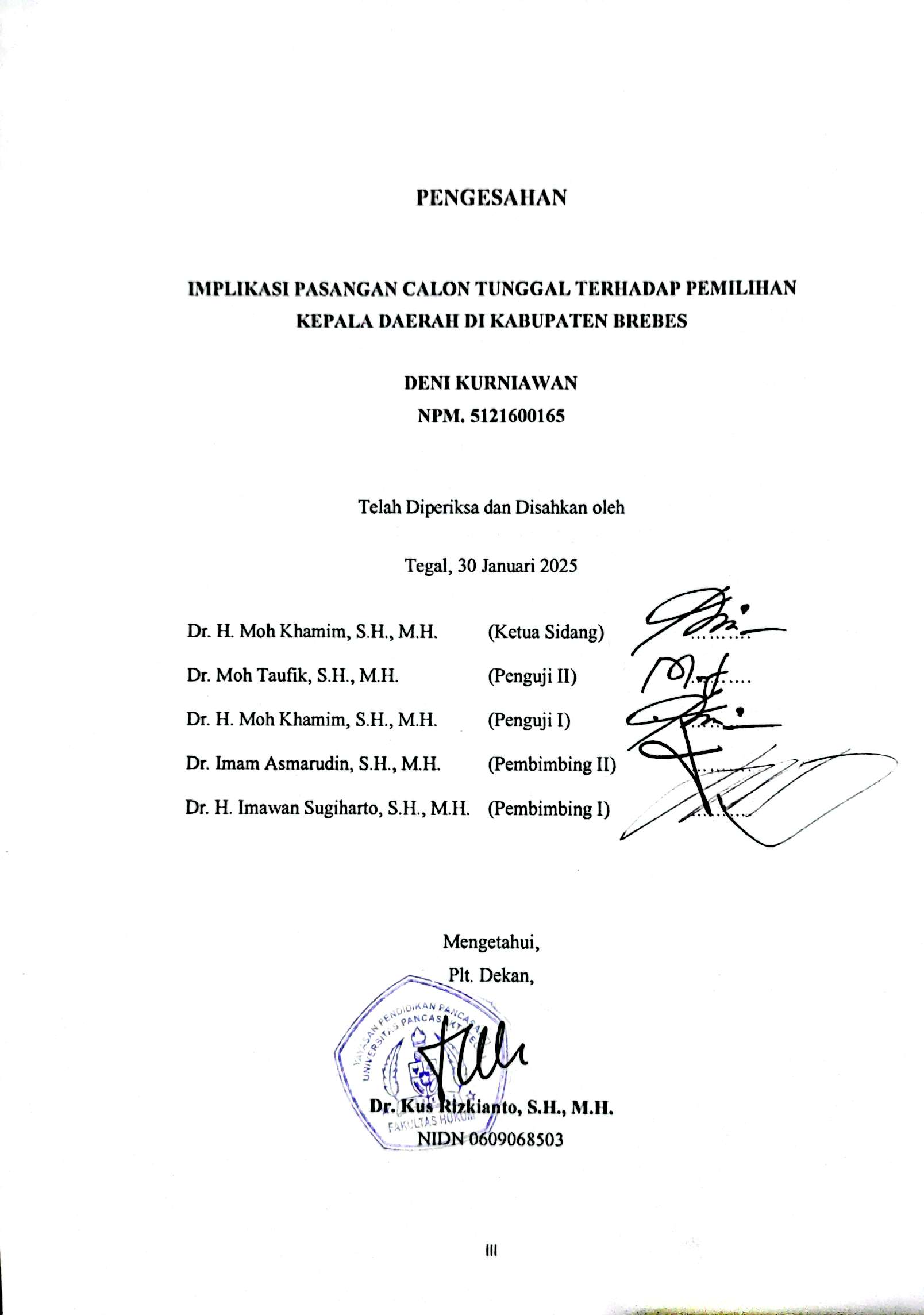
**NPM 5121600165**

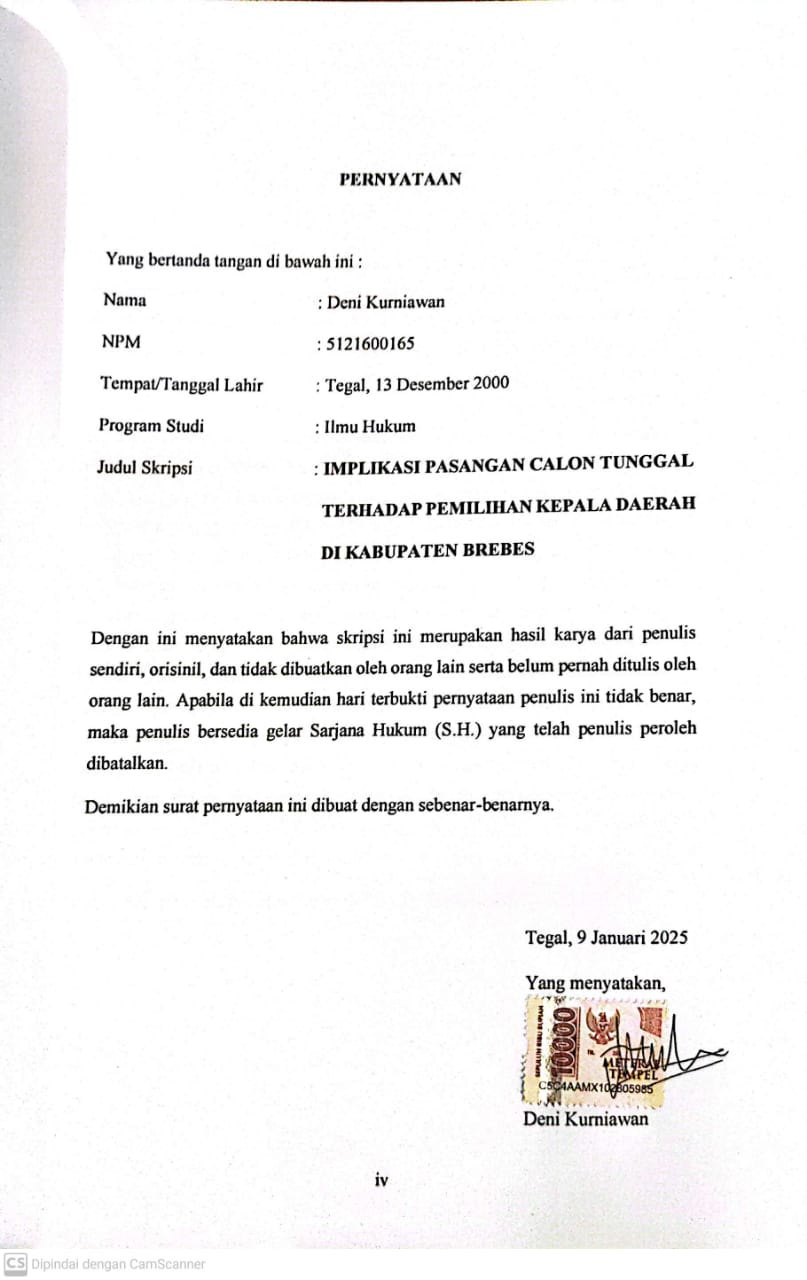
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

****

****

****

**ABSTRAK**

Sistem demokrasi di Indonesia dijalankan melalui mekanisme pemilihan umum, yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakilnya, termasuk kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui Pilkada. Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memimpin pemerintahan daerah masing-masing dipilih secara langsung oleh rakyat. Fenomena pasangan tunggal pertama kali muncul di Pilkada tahun 2015 dan kembali terjadi dalam Pilkada serentak tahun 2024. Kabuapten Brebes adalah salah satu daerah yang memiliki pasangan calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang mengatur mekanisme pencalonan pasangan calon tunggal serta dampak keberadaan pasangan tunggal dalam Pilkada di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, serta penelusuran informasi secara daring melalui situs web dan berita. Data kemudian disusun dalam bentuk narasi secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pencalonan pasangan calon tunggal dalam Pilkada diatur di hukum Indonesia. Fenomena pasangan calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Brebes 2024 menunjukkan fleksibilitas sistem pemilu, tetapi menimbulkan implikasi demokratis berupa berkurangnya kompetisi politik dan terbatasnya pilihan masyarakat. Kotak kosong menjadi simbol penolakan masyarakat, memunculkan perlunya evaluasi sistem pencalonan untuk mendorong partisipasi politik yang lebih luas kedepannya.

**Kata kunci** : *Pasangan Calon Tunggal, Pilkada, Demokrasi*

**ABSTRACT**

*The democratic system in Indonesia is run through a general election mechanism, which gives the people the opportunity to elect their representatives, including regional heads at the provincial and district / city levels through regional elections. Governors, Regents, and Mayors who lead their respective regional governments are directly elected by the people. The single-pair phenomenon first appeared in the 2015 regional elections and will occur again in the 2024 simultaneous regional elections. Brebes Regency is one of the regions that has a single candidate pair in the implementation of regional head elections. This study aims to examine the legal basis governing the nomination mechanism of a single candidate pair as well as the impact of the existence of a single pair in the Pilkada in Brebes Regency. This research uses data from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through a literature study of laws and regulations, as well as online information searches through websites and news. The data were then systematically arranged in narrative form and analyzed using qualitative methods. The results of this study show that the nomination of a single candidate pair in the Pilkada is regulated in Indonesian law. The phenomenon of a single candidate pair in the 2024 Brebes Regency Pilkada shows the flexibility of the electoral system, but has democratic implications in the form of reduced political competition and limited community choice. The empty box becomes a symbol of community rejection, raising the need to evaluate the nomination system to encourage wider political participation in the future.*

***Keywords****: Single Candidate Pair, Regional Head Elections, Democracy*

**MOTTO**

*"Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."*

(Q.S. Ar -Rad 11)

“*Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”*

(Q.S. Ar-Rum 60)

*"Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan."*

(Tan Malaka)

*“Ketika kau melakukan usaha mendekati cita-citamu, di waktu yang bersamaan cita-citamu juga sedang mendekatimu. Alam semesta bekerja seperti itu.”*

(Fiersa Besari)

**MAN JADDA WAJADA**

**PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.
2. Orang tua tersayang, Bapak Sukur dan Ibu Siti Rohayati yang sudah menjadi figur orang tua yang hebat di mata penulis. Tanpa dukungan serta doa tulus keduanya, tentu penulis tidak akan sampai di titik ini. Semoga kalian berdua panjang umur dan sehat selalu.
3. Adik penulis, Putri Dwi Aulia. Terimakasih sudah memerankan figur adik perempuan dengan baik.
4. Segenap keluarga dan para kucing peliharaan penulis (Aceng dan Jawir) yang sudah membuat rumah menjadi benar-benar rumah.
5. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis.
6. Rekan-rekan PPS Desa Dukuhwaru serta Perangkat Desa Dukuhwaru yang sudah mengizinkan penulis menggunakan printer balai desa selama proses penulisan skripsi ini.
7. Wanita spesial dari bumi bagian tenggara. Terimakasih sudah terlahir di dunia ini. Tetaplah menjadi pribadi yang meneduhkan.
8. Rekan seperjuangan penulis, Budi, Wandi, dan Sigit. Terimakasih sudah mau berjuang bersama, memilih untuk mengesampingkan kenikmatan sesaat demi lulus 3,5 tahun bersama-sama.
9. Yang terakhir serta yang paling utama, terimakasih kepada diri saya sendiri. Terimakasih sudah mau berkompromi dengan banyak hal. Semoga proses perkuliahan menjadi satu tonggak penting dalam meraih kesuksesan. Semoga ilmu yang telah diterima dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat luas. Aamiin.

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT., *alhamdulillah* penyusun skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancsakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW., yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H Selviany M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Bapak Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan ilmu dan bimbingan serta arahan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi strata 1.
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang memeberikan layanan dengan baik, sabar dan ramah.
9. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
10. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi, semangat dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan dengan balasan yang lebih besar dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi yang telah dibuat dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 9 Januari 2025

Deni Kurniawan

**DAFTAR ISI**

**PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN ii**

**PENGESAHAN iii**

**PERNYATAAN iv**

**ABSTRAK v**

**ABSTRACT vi**

**MOTTO vii**

**PERSEMBAHAN viii**

**KATA PENGANTAR x**

**DAFTAR ISI xii**

**BAB I 1**

**PENDAHULUAN 1**

1. **Latar Belakang 1**
2. **Rumusan Masalah 7**
3. **Tujuan Penelitian 7**
4. **Urgensi Penelitian 7**
5. **Tinjauan Pustaka 8**
6. **Metode Penelitian 11**
7. **Sistematika Penulisan 17**

**BAB II 19**

**TINJAUAN KONSEPTUAL 19**

1. **Tinjauan Umum Tentang Demokrasi Dan Pemilu 19**
2. **Definisi Demokrasi 19**
3. **Prinsip Dasar Demokrasi 20**
4. **Definisi Pemilu 26**
5. **Jenis-Jenis Sistem Pemilu 27**
6. **Tinjauan Umum Tentang Pilkada 29**
7. **Definis Pilkada 29**
8. **Sejarah Pilkada 31**
9. **Tujuan Dan Fungsi Pilkada 48**
10. **Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada 56**
11. **Tinjauan Umum Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada 58**
12. **Definisi Pasangan Calon Tunggal 58**
13. **Sejarah Munculnya Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada 59**

**BAB III 63**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63**

1. **Pengaturan Pasangan Calon Tunggal Dalam Sistem Pilkada Di Indonesia 63**
2. **Aturan Hukum Pasangan Calon Tunggal 63**
3. **Keabsahan Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada 65**
4. **Konsekuensi Kemenangan Kotak Kosong 67**
5. **Implikasi Keberadaan Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pilkada Di Kabupaten Brebes 71**
6. **Proses Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Di Kabupaten Brebes 71**
7. **Dampak Terhadap Respon Publik 76**
8. **Hasil Perhitungan Suara Pilkada Brebes 78**

**BAB IV 81**

**PENUTUP 81**

1. **Simpulan 81**
2. **Saran 82**

**DAFTAR PUSTAKA 84**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP 93**

# BAB I

# PENDAHULUAN

# A. **Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menuntut supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam konteks Pilkada, penerapan hukum yang adil dan transparan menjadi fondasi untuk menjamin hak politik warga negara, mencegah pelanggaran, serta memastikan proses demokrasi yang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu sarana utama dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat secara langsung diberikan hak untuk memilih pemimpin daerah yang nantinya mengatur dan mengelola pemerintahan di tingkat lokal. Pilkada tidak hanya menjadi simbol pelaksanaan kedaulatan rakyat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan adanya partisipasi publik dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan Pilkada berfungsi sebagai wadah bagi rakyat untuk memberikan mandat dan justifikasi kepada Kepala Daerah, dengan harapan pemimpin yang terpilih mampu mengupayakan kebutuhan masyarakat.[[1]](#footnote-1) Proses ini membuka peluang bagi calon pemimpin dari beragam latar belakang untuk berkompetisi dan menyampaikan visi serta misi mereka kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh dukungan dan kepercayaan publik untuk memimpin serta mewujudkan aspirasi yang mereka usung.[[2]](#footnote-2)

Pilkada langsung pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 2005. Sebelum adanya metode pemilihan langsung, kepala daerah diangkat oleh presiden atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[[3]](#footnote-3) Pilkada tahun 2005 menandai tonggak sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, khususnya di tingkat lokal, sebagai langkah awal dalam memperkuat sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan partisipatif. Melalui mekanisme ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk secara langsung menentukan pemimpin daerah yang dianggap mampu merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Sistem ini tidak hanya mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah, tetapi juga memperkuat kedaulatan rakyat sebagai landasan utama demokrasi, dengan menyediakan kesempatan yang lebih besar bagi partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal.

Kemudian pada tahun 2015 Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan. Pilkada serentak merupakan mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Maksud dilakukannya Pilkada serentak adalah untuk meminimalisir anggaran serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.[[4]](#footnote-4) Mekanisme ini dianggap sebagai bentuk konkret dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, di mana partisipasi masyarakat menjadi unsur yang sangat vital. Pilkada serentak adalah salah satu upaya untuk merealisasikan agenda demokrasi secara menyeluruh sekaligus menjadi bentuk nyata komitmen negara demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.[[5]](#footnote-5) Hal ini mencerminkan upaya negara untuk memastikan partisipasi politik yang merata serta menciptakan pemerintahan yang berlandaskan aspirasi rakyat. Selain itu, pelaksanaan pilkada serentak juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses demokrasi, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.

Pada Pilkada serentak pertama yang diadakan di tahun 2015, terdapat tiga daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, sehingga mereka berkompetisi melawan kolom kosong. Ini menandai awal dari fenomena pasangan calon tunggal dalam konteks Pilkada di Indonesia. Kemudian di tahun 2017, jumlah pasangan calon tunggal meningkat menjadi sembilan calon tunggal. Dalam Pilkada 2018 bertambah menjadi 16 calon tunggal, dan Pilkada 2020 bertambah menjadi 25 calon tunggal.[[6]](#footnote-6)

Pilkada 2024 serentak dilangsungkan di tanggal 27 November 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan terdapat 37 wilayah yang mempunyai pasangan calon tunggal dalam Pilkada 2024.[[7]](#footnote-7) Hal ini mengindikasikan adanya peningakatan jumlah pasangan tunggal pada setiap edisi Pilkada.

Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 memperbolehkan penyelenggaraan pilkada calon tunggal melalui mekanisme referendum bertujuan untuk mengatasi tantangan demokratisasi dalam situasi di mana hanya ada satu calon yang bersaing.[[8]](#footnote-8) Kemudian ditegaskan ulang pada “Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada”. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pemilihan dengan satu pasangan calon atau calon tunggal dapat diselenggarakan jika setelah masa penundaan hingga akhir perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat.

Fenomena pasangan tunggal atau sering disebut juga kontestasi melawan kotak kosong ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum dan demokrasi. Adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memberikan ruang bagi kotak kosong untuk menjadi pilihan alternatif bagi pemilih jika hanya ada satu pasangan calon. Namun, di sisi lain, fenomena ini dianggap sebagai anomali dalam demokrasi elektoral yang seharusnya menawarkan pilihan yang beragam bagi masyarakat.

Selain itu, keberadaan calon tunggal juga sering dikaitkan dengan dominasi oligarki politik, minimnya regenerasi kepemimpinan, dan adanya kendala dalam mekanisme pencalonan, seperti persyaratan yang berat atau adanya kontrol yang kuat oleh elite politik lokal. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan penurunan kualitas demokrasi, di mana proses Pilkada tidak lagi menjadi ajang kompetisi yang sehat antara calon-calon yang menawarkan visi dan misi yang berbeda, melainkan menjadi formalitas semata.

Munculnya pasangan calon tunggal juga terjadi pada perhelatan Pilkada 2024 di Kabupaten Brebes. Calon bupati dan calon wakil bupati Paramitha Widya Kusuma-Wurja mendaftar di KPU Brebes dengan diusung 12 parpol. Pasangan ini ditetapkan menjadi calon tunggal karena hingga akhir masa pendaftaran hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat. Fenomena ini menimbulkan reaksi di masyarakat. Sekelompok massa yang menyebut diri sebagai Gertak (Gerakan Kotak Kosong) mengadakan aksi damai di pelataran kantor KPU Brebes. Mereka hadir menjelang pengundian nomor urut pasangan calon.[[9]](#footnote-9) Massa ini kecewa terhadap hanya munculnya satu pasangan calon dan ramai-ramai mendeklarasikan dukungannya untuk kotak kosong.

Sejarah mencatat, kemenangan kotak kosong pernah terjadi. Pada Pilkada 2018 di Kota Makasar, kotak kosong berhasil unggul suara dari pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi. Kemudian di Pilkada serentak tahun 2024, terdapat dua daerah yang kotak kosong berhasil unggul dari pasangan calon. Peristiwa tersebut terjadi di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Hal ini menunjukan bahwa suara rakyat adalah hal vital dalam menentukan arah demokrasi di Indonesia.

Melalui penelitian yang berjudul **“IMPLIKASI PASANGAN CALON TUNGGAL TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BREBES”**, diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif terkait fenomena pasangan tunggal dalam Pilkada di Kabupaten Brebes. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akademis tentang bagaimana regulasi saat ini mengatur keberadaan pasangan calon tunggal. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman akademis, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan aktor politik untuk memperbaiki proses Pilkada berikutnya.

# B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pasangan calon tunggal dalam sistem Pilkada di Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi keberadaan pasangan calon tunggal terhadap Pilkada di Kabupaten Brebes ?

# C. **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dasar hukum yang mengatur mekanisme pencalonan pasangan calon tunggal pada Pilkada.
2. Menganalisis implikasi adanya pasangan calon tunggal dalam Pilkada di Kabupaten Brebes.

# D. **Urgensi Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam kajian mekanisme pemilihan kepala daerah terkait fenomena pasangan tunggal. Penelitian ini juga memperkaya teori demokrasi, terutama dalam hal kompetisi politik dan kebebasan memilih dalam sistem demokrasi lokal, dengan menyoroti apakah fenomena kotak kosong masih mencerminkan esensi demokrasi. Selain itu, penelitian ini menjadi referensi teoritis untuk meninjau kembali aturan dalam Undang-Undang Pilkada terkait pasangan tunggal, sekaligus mempertimbangkan implikasi aturan tesebut manakala kotak kosong menjadi pemenang dalam Pilkada.

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pelaksana pemilu seperti KPU dan Bawaslu dalam mengevaluasi aturan tentang pasangan calon tunggal, serta memberikan panduan bagi pemerintah daerah dan partai politik dalam memahami dampaknya. Selain itu, penelitian ini juga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fenomena kotak kosong, sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi mereka dalam Pilkada.

# E**. Tinjauan Pustaka**

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas studi penelitian terdahulu mengenai pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dengan fokus penelitian yang berbeda, yaitu antara lain :

1. Pertama pembahasan dari jurnal berjudul “*Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi”* karya Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, dan Marchethy Riwani Diaz. Studi ini membahas tentang fenomena calon tunggal pada Pilkada. Menerangkan apakah munculnya calon tunggal dalam kontestasi politik lokal adalah sebuah hal yang normal dalam negara dmokrasi atau menjadi suatu anomali. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metodologi doktrinal untuk menggali informasi terkait penyebab fenomena calon tunggal dan kaitannya terhadap eksistensi demokrasi di Indonesai.[[10]](#footnote-10)
2. Studi lainnya berjudul “*Kaderisasi Partai Politik untuk Diajukan Calon Legislatif”* yang ditulis oleh Muhammad Rizki Ramadhani. Penelitian ini menganalisis dampak buruknya proses kaderisasi dalam organisasi partai politik terhadap kinerja kader dalam proses kepemimpinan, serta mengungkap alasan mengapa banyak kader yang lebih setia kepada ketua umum partai daripada kepada masyarakat.[[11]](#footnote-11) Kaderisasi partai politik yang tidak optimal mengakibatkan minimnya sosok yang kompeten untuk maju sebagai calon legislatif. Dalam konteks pilkada, gagalnya kaderisasi partai politik adalah salah satu penyebab munculnya pasangan calon tunggal.
3. Selanjutnya dalam studi yang ditulis oleh Versilia Anggraini dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020)”. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis mengidentifikasi tiga kelompok pemilih dalam pilkada yaitu tidak memilih, memilih kotak kosong, dan memilih pasangan calon.[[12]](#footnote-12) Hadirnya kotak kosong dalam perhelatan pilkada memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap respon masyarakat selama tahapan dari pilkada itu sendiri.
4. Kemudian dalam tesis yang ditulis oleh Apriadi mengenai “Problematika Kotak Kosong Pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Indonesia”. Dalam konteks ini, adanya calon tunggal yang bersaing dengan kotak kosong dianggap sebagai kondisi terburuk dalam demokrasi. Hal ini disebabkan karena selain tidak ada pesaing bagi calon tunggal, kekalahannya juga membuka peluang terpilihnya pemimpin yang sebenarnya tidak diinginkan oleh rakyat.[[13]](#footnote-13)
5. Merujuk pada studi sebelumnya yaitu jurnal yang berjudul “Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia” yang ditulis oleh Ahmad Yantomi. Kemenangan kotak kosong dalam Pemilukada berdampak pada diulangnya pemilihan pada tahun berikutnya jika pasangan calon memperoleh suara sah kurang dari 50%. Untuk mengisi kekosongan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menunjuk Penjabat (Pj) Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat.[[14]](#footnote-14)

Berdasarkan studi yang telah penulis paparkan di atas maka, penulis sampaikan bahwa penelitian yang akan ditulis kali ini lebih berfokus membahas pada fenomena pasangan tunggal melawan kotak kosong dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 khususnya yang terjadi di Kabupaten Brebes. Tentang bagaimana regulasi mengatur hal tersebut, hal itu dapat terjadi, dan implikasinya dalam perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di Kabupaten Brebes.

# F. **Metode Penelitian**

## **Jenis Penelitian**

Hasil penulisan menggunakan penelitian kualitatif dan memakai prosedur penelitian kepustakaan (*library research).* Penelitian kepustakaan ialah penelitian dengan penggunaan data sekunder. Data penelitian dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.[[15]](#footnote-15) Investigasi subjektif dapat menjadi strategi investigasi yang penerapannya untuk merenungkan keajaiban yang berada dalam kondisi alamiah, di mana analis bertindak sebagai instrumen utama. Metode pengumpulan informasi dilakukan dengan pendekatan triangulasi, pemeriksaan informasi bersifat induktif, dan investigasi subjektif lebih berpusat pada makna daripada generalisasi.[[16]](#footnote-16)

## **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang diterapkan dalam tulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan satu metode penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan ketentuan, prinsip, atau doktrin hukum guna memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.[[17]](#footnote-17) Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur fenomena pasangan tunggal dalam Pilkada serta ketentuan tentang kotak kosong sebagai pilihan alternatif dalam pemilihan kepala daerah. Kajian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan dalam konteks pasangan calon tunggal.

Pendekatan penelitian ini memiliki ruang lingkup “*statute approach”* dan “*case approach”. Statute approach* ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan menilik aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang bahas (diteliti) untuk menemukan dasar hukum yang relevan dan mendukung analisis terhadap permasalahan hukum tersebut.[[18]](#footnote-18) *Case approach* ialah metode yang diterapkan dengan menganalisis segala permaslahan yang relevan dengan isu yang sedang terjadi dan sudah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.[[19]](#footnote-19) Penggunaan studi pustaka bertujuan untuk memperoleh teori, data, dan kasus dari penelitian sebelumnya serta bukti pendukung yang relevan untuk skripsi yang akan disusun, sehingga dapat memperkuat landasan teori dan argumen yang dibangun dalam penelitian.

## **Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut pendapat Edi Riadi, data sekunder adalah informasi yang didapat secara tidak langsung dari proses yang sedang direnungkan, yang dapat diperoleh melalui sumber-sumber lain seperti situs web atau referensi yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.[[20]](#footnote-20) Penulis akan menggunakan data sekunder studi pustaka. Menurut Mukhadis, Ibnu, Dasna bahan studi pustaka dapat berasal dari tiga sumber : [[21]](#footnote-21)

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas beberapa Peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. “UUD NRI Tahun 1945;
2. Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII-2015;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota”.
11. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua distribusi atau penyebaran informasi tentang hukum yang bukan merupakan catatan resmi.[[22]](#footnote-22) Data sekunder yang digunakan adalah dokumen hukum, studi penelitian, dan data informasi pendukung sebagai referensi dalam kajian tentang pasangan calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup KBBI, kamus hukum, dan situs web yang relevan, yang menjelaskan serta memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang diterapkan oleh peneliti. Sumber-sumber tersebut berfungsi untuk memberikan klarifikasi tambahan dan konteks yang lebih luas, sehingga memudahkan penulis dalam memahami dan menginterpretasikan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

## **Metode Pengumpulan Data**

Data sekunder dapat dihimpun dengan berbagai cara. Untuk pengumpulan data sekunder, metode penelitian perpustakaan daring dan luring dapat digunakan.[[23]](#footnote-23)

## **Rencana Jadwal Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kegiatan | September  2024 | Oktober  2024 | November  2024 | Desember  2024 |
| 1. | Penyusunan  Proposal |  |  |  |  |
| 2. | Seminar Proposal |  |  |  |  |
| 3. | Pengumpulan  Data |  |  |  |  |
| 4. | Pengelolaan  Data |  |  |  |  |
| 5. | Penyajian Data / Penyusunan Skripsi |  |  |  |  |
| 6. | Revisi Penggadaan |  |  |  |  |

## **Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah mekanisme kultivasi data untuk menemukan pola, rangkaian, dan termasuk informasi penting. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih terkait data dan mengambil keputusan berdasarkan temuan. Metode analisis penelitian kualitatif adalah metode yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Implikasi Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Brebes”. Penelitian kualitatif mencakup analisis dan pemahaman terhadap perilaku serta proses sosial dalam masyarakat yang bersifat spesifik dan teratur sebagai tujuan utamanya. Penelitian ini juga menekankan pada proses dan makna yang tidak dianalisis secara ketat dari segi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya.[[24]](#footnote-24)

## **Sistematika Penulisan**

Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini ke dalam empat bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Pembagian skripsi menjadi bab dan sub bab ini bertujuan untuk mengorganisasi pembahasan secara sistematis, sehingga setiap permasalahan yang diangkat dapat dijelaskan secara rinci dan terstruktur dengan baik, memudahkan pembaca untuk memahami inti dari setiap isu yang dibahas.Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.** Bab ini memuat tinjauan umum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat antara lain :

1. Tinjauan umum tentang demokrasi dan pemilu.
2. Tinjauan umum tentang Pilkada.
3. Tinjauan umum tentang mekanisme penyelenggaraan Pilkada.
4. Tinjauan umum tentang pasangan calon tunggal dalam Pilkada.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terkait fenomena pasangan tunggal dalam Pilkada di Indonesia. Bagaimana implikasi pasangan calon tunggal dalam Pilkada di Kabupaten Brebes.

**BAB IV PENUTUP.** Bab ini adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban umum dari permasalahan yang ditemukan dalam hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran atau rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

# Tinjauan Umum Tentang Demokrasi dan Pemilu

# Definisi Demokrasi

# Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni *"demos"* (rakyat) dan *"kratos"* (pemerintahan). Dengan demikian, dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan di mana rakyat memegang peranan utama.[[25]](#footnote-25) Secara harfiah, demokrasi berarti sistem politik di mana kekuasaan berada di tangan rakyat sebagai penguasa tertinggi.[[26]](#footnote-26) Demokrasi menurut Hans Kelsen adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, di mana pelaksanaan kekuasaan negara dipegang oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan, setelah adanya keyakinan terhadap aturan yang telah ditetapkan terkait dengan penerapan kekuasaan negara.[[27]](#footnote-27)

# Sesuai dengan “Pasal 1 ayat (2) UUD NRI tahun 1945”, kedaulatan Indonesia berada sepenuhnya di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang Undang Dasar. Hal ini menegaskan bahwa rakyat memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan melalui mekanisme demokrasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses demokrasi yang berkualitas bermaksud untuk menjamin kepentingan rakyat dan menciptakan iklim bernegara yang adil dan makmur.

# Demokrasi mengatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan. Dengan cara ini, rakyat akan membuat aturan yang baik dan melindungi hak-haknya. Untuk mencapainya, diperlukan sebuah peraturan bersama yang menjamin dan melindungi hak-hak rakyat dan berfungsi sebagai dasar kehidupan bernegara. Peraturan seperti itu dikenal sebagai Konstitusi. Aturan yang ada haruslah selaras dengan kepentingan masyarakat luas dan bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan golongan tertentu saja.

# Prinsip Dasar Demokrasi

# Negara Indonesia saat ini menganut sistem demikrasi Pancasila. Menurut Prof Notonegoro, “demokrasi Pancasila merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (YME), berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.[[28]](#footnote-28)

# Prinsip yang dianut dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Pancasila sebagai idiologi negara merupakan pedoman bagi seluruh warga negara dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia :

# Ketuhanan

# Prinsip Ketuhanan dalam demokrasi Pancasila, yang termaktub dalam sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menjadi landasan spiritual dan moral bagi sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip ini mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi dan menekankan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila tidak memisahkan antara urusan negara dan agama, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan ke dalam setiap aspek kehidupan politik dan sosial.

# Implementasi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa terlihat dalam jaminan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, di mana setiap individu berhak untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Selain itu, prinsip ini mendorong terciptanya toleransi antarumat beragama, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan harmonis meskipun memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dengan demikian, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya menjadi pembeda utama demokrasi Pancasila dari sistem demokrasi sekuler di negara-negara Barat, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bahwa nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama harus dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan karakter bangsa.

# Kemanusiaan

# Dalam demokrasi Pancasila, prinsip kemanusiaan, yang disebut sebagai "kemanusiaan yang adil dan beradab," menegaskan betapa pentingnya menghormati harkat dan martabat manusia. Konsep ini berfungsi sebagai dasar untuk melindungi hak asasi manusia dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Prinsip-prinsip ini dalam praktiknya mencakup perlindungan hak-hak dasar setiap orang, termasuk hak untuk hidup, berpendapat, dan mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi. Mereka juga mendukung penegakan keadilan bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka, dan menentang segala bentuk penindasan dan diskriminasi.

# Bagian penting dari prinsip ini adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, yang membangun sikap saling menghormati dan toleransi satu sama lain untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam. Prinsip kemanusiaan juga menuntut perlakuan manusiawi bagi setiap orang dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik dalam konteks sosial maupun hukum. Oleh karena itu, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya menjamin hak-hak setiap orang tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tengah keragaman masyarakat Indonesia, membantu membangun masyarakat yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

# Persatuan

# Prinsip persatuan dalam demokrasi Pancasila, yang tercermin dalam sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya kesatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Prinsip ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik dalam hal suku, agama, maupun budaya. Dalam konteks demokrasi, persatuan menjadi fondasi untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik, di mana setiap individu merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa.

# Implementasi prinsip persatuan dalam demokrasi Pancasila terlihat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah melalui musyawarah untuk mufakat, yang menjadi metode pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan atau individu. Selain itu, prinsip ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, sehingga setiap suara dapat didengar dan dihargai. Dengan demikian, persatuan tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang memperkuat solidaritas antarwarga negara.

# Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pergeseran nilai-nilai sosial, menjaga persatuan menjadi semakin penting. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa meskipun terdapat perbedaan yang mencolok, semua elemen bangsa harus bersatu untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan menegakkan prinsip persatuan, demokrasi Pancasila dapat berfungsi secara optimal sebagai sistem yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

# Kerakyatan

# Prinsip kerakyatan dalam demokrasi Pancasila, yang tercermin dalam sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menekankan bahwa kedaulatan dan kekuasaan politik sepenuhnya berada di tangan rakyat. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, di mana setiap individu berhak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan.

# Implementasi prinsip kerakyatan juga terlihat dalam pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka. Hal ini memastikan bahwa setiap suara dihargai dan diakomodasi dalam sistem pemerintahan. Selain itu, prinsip kerakyatan menolak dominasi kelompok tertentu, baik mayoritas maupun minoritas, sehingga semua elemen masyarakat dapat berkontribusi secara adil dalam proses politik.

# Dengan demikian, prinsip kerakyatan dalam demokrasi Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan bagi sistem pemerintahan yang demokratis, tetapi juga sebagai pengingat bahwa keberhasilan suatu negara tergantung pada keterlibatan aktif dan kesadaran kolektif rakyatnya. Melalui prinsip ini, diharapkan tercipta pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

# Keadilan Sosial

# Prinsip keadilan sosial dalam demokrasi Pancasila, yang tercantum dalam sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur tanpa diskriminasi. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, politik, ekonomi, dan budaya. Keadilan sosial tidak hanya berfokus pada kesetaraan hak, tetapi juga pada pemenuhan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

# Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat dan menjaga kepentingan umum demi tercapainya kesejahteraan bersama. Dengan demikian, keadilan sosial menjadi landasan bagi terciptanya struktur sosial yang harmonis dan stabil, di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat dan berkontribusi pada pembangunan bangsa secara keseluruhan.

# Definisi Pemilu

# Pemilihan umum (pemilu) adalah mekanisme untuk memilih individu yang akan menduduki posisi-posisi politik tertentu.[[29]](#footnote-29) Proses ini dilakukan secara periodik dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara. Pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mencerminkan kehendak rakyat dan memiliki legitimasi untuk menjalankan pemerintahan.

# Berdasarkan “Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

# Pemilu merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem demokrasi suatu negara. Pemilu memberikan peluang bagi masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin dan wakil mereka. Lebih dari sekadar kegiatan politik yang biasa, pemilu berfungsi sebagai elemen kunci yang mendukung keberlangsungan demokrasi di sebuah negara. Pemilu ialah salah satu elemen penting dalam pilar demokrasi dan berfungsi sebagai alat untuk membentuk pemerintahan yang mendapatkan legitimasi berdasarkan pilihan yang sepenuhnya berasal dari kehendak rakyat.

# Jenis-Jenis Sistem Pemilu

# Sistem pemilu adalah mekanisme utama dalam demokrasi untuk menerjemahkan suara rakyat menjadi perwakilan politik. Di dunia, terdapat berbagai jenis sistem pemilu dengan karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing, yang memengaruhi representasi dan stabilitas pemerintahan. Berikut jenis-jenis sistem pemilu yang ada di dunia :

# Sistem Pluralitas

# Sistem ini juga disebut sebagai sistem distrik, di mana wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang umumnya disesuaikan dengan jumlah penduduk. etiap daerah pemilihan diwakili oleh satu agen, kecuali dalam varian *Block Vote* dan *Party Block Vote*. Dalam kerangka kerja ini, kandidat yang mendapatkan suara terbanyak akan mengumpulkan semua suara di daerah tersebut.[[30]](#footnote-30) Sistem ini memiliki beberapa varian yaitu *First Past the Post, Alternative Vote, Two Round System,* dan *Block Vote.*

# Sistem Proporsional

# Dalam sistem perwakilan proporsional, jumlah kursi yang diperoleh suatu partai di daerah pemilihan sebanding dengan persentase suara yang diperolehnya. Variasi dari sistem ini meliputi *proporsional representation* dan *transferable vote*.[[31]](#footnote-31)

# Sistem Campuran Merupakan gabungan antara sistem pluralitas dan sistem proporsional, di mana elemen-elemen dari kedua sistem tersebut digabungkan untuk menciptakan mekanisme pemilihan yang dapat mencerminkan suara mayoritas sekaligus memberikan representasi yang lebih adil terhadap partai politik atau calon di berbagai daerah pemilihan.

# Saat ini, sistem pemilu di Indonesia menggunakan proporsional terbuka. Sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia memungkinkan pemilih mencoblos partai politik atau langsung memilih calon legislatif (caleg) yang diinginkan, sehingga disebut juga sistem coblos caleg.[[32]](#footnote-32)

# Tinjauan Umum Tentang Pilkada

# Definisi Pilkada

# Sistem demokrasi politik di Indonesia diterapkan melalui sistem pemilihan umum yang memungkinkan rakyat memilih wakil mereka, termasuk pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi yang dikenal sebagai pilkada. Pilkada adalah singkatan dari pemilihan kepala daerah yang merujuk pada pemilihan secara langsung oleh warga daerah administratif setempat dengan persyaratan telah memenuhi syarat.

# Makna dari pilkada secara demokratis menurut “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.[[33]](#footnote-33) “Pasal 18 ayat (4) UUD 1945” menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis." Ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilangsungkan dengan cara yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

# Dalam “Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang”, dijelaskan bahwa “pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih pemimpin secara langsung dan demokratis”.

# Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi ,Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kabupaten/Kota, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tingkat Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tingkat Kabupaten/Kota.[[34]](#footnote-34) Penyelenggaraan ini bertujuan untuk menjamin proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. KPU bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, hingga rekapitulasi hasil pemilihan, sementara Panwaslu memiliki peran penting dalam memastikan tidak adanya pelanggaran yang dapat mencederai integritas Pilkada. Dengan adanya sinergi antara KPU dan Panwaslu, diharapkan setiap tahap Pilkada dapat berjalan dengan baik, menciptakan pemilu yang berkualitas, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat daerah.

# Sejarah Pilkada

# Pilkada merupakan unsur penting dalam proses perubahan politik menuju penguatan demokrasi daerah, yang bermuara pada terciptanya kondisi tpemerintahan daerah yang representatif, efisien dan berorientasi pada masyarakat.[[35]](#footnote-35) Dari masa ke masa pilkada mengalami perubahan guna mengikuti perubahan zaman dan mengakomodir berbagai kepentingan. Segala perbaikan baik dari segi teknis maupun hukum selalu diupayakan demi terciptanya demokrasi yang dicita-citakan. Pilkada di Indonesia sudah melewati transformasi penting selama ini, mencerminkan perubahan dalam sistem pemerintahan dan demokrasi di negara ini. Berikut perkembangan Pilkada dari masa penjajahan hingga saat ini :

# Pilkada Pada Zaman Penjajahan

# Sejarah masa penjajahan Belanda, regulasi atau acuan dalam melakukan pemilihan kepala daerah sudah ada, yakni tertuang dalam “*Decentralisatie Wet 1930”*. Pada periode tersebut, sistem yang diterapkan untuk pemilihan kepala daerah adalah pengangkatan oleh pemerintah.[[36]](#footnote-36) *Decentralisatie Wet 1930*, juga dikenal sebagai Undang-Undang Desentralisasi, adalah bagian dari upaya pemerintah Belanda untuk mengubah sistem pemerintahan Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dari sentralisasi ke desentralisasi. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberi daerah Hindia Belanda lebih banyak otonomi dalam mengelola pemerintahan dan keuangan mereka sendiri.

# Pada masa penjajahan Belanda, kepala daerah untuk wilayah Kabupaten dan Kecamatan ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kolonial, sementara untuk wilayah provinsi, jabatan kepala daerah diisi oleh Pemerintah Kolonial Belanda.[[37]](#footnote-37) Pada waktu itu, pemerintahan daerah berbeda dengan apa yang ada sekarang. Kedudukannya dimulai dari paling atas, yakni *gewest* (provinsi) yang dipimpin gubernur, karesidenan yang dipimpin residen, *afdeling* dipimpin asisten residen, kabupaten dipimpin bupati, lalu ada *district* atau kawedanan yang dipimpin wedana, dan *onderdistrict* atau kecamatan yang dipimpin camat.[[38]](#footnote-38)

# Penunjukan kepala daerah pada masa kolonial tidaklah berorientasi pada kepentingan rakyat. Pemimpin-pemimpin wilayah dipilih dan diseleksi sesuai dengan kepentingan penjajah serta yang memiliki hubungan dekat dengan para penjajah pada masa itu. Hal tersebut dilakukan supaaya kordinasi dari struktur yang paling atas sampai ke bawah berjalan dengan lancar dan tidak terjadi gesekan yang berdampak buruk pada kedudukan Belanda di Indonesia.

# Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang secara resmi menguasai Indonesia dan segera memulai langkah-langkah untuk mengurangi pengaruh Barat di wilayah tersebut.[[39]](#footnote-39) Selama penjajahan Jepang (1942-1945), sistem pemerintahan dan proses atau mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan meskipun tidak ada mekanisme pemilihan yang demokratis. Pemerintah Jepang mengimplementasikan kontrol yang ketat terhadap struktur pemerintahan daerah, dengan semua jabatan ditentukan langsung oleh pemerintah kolonial.

# Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, terdapat tiga undang-undang yang dikenal sebagai “*Osamu Seirei 1942/27*”, yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan. Undang-undang tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 27 yang mengatur perubahan sistem pemerintahan, ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2602 (tahun Masehi 1942). Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 28 yang mengatur perubahan dalam struktur pemerintahan yang disebut "*syuu*", yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2602. Terakhir, Undang-Undang Nomor 30 berfokus pada pengubahan nama negeri dan daerah, yang ditetapkan pada tanggal 1 September 2602. Ketiga undang-undang ini mencerminkan upaya Jepang untuk merestrukturisasi sistem pemerintahan di Indonesia sesuai dengan kepentingan mereka selama masa penjajahan.[[40]](#footnote-40)

# Pemerintahan Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi karesidenan yang dikenal dengan istilah "*syuu*", di mana kepala karesidenan disebut "*syuutyoo*". Di bawah karesidenan, terdapat dua tingkat pembagian daerah yang disebut "*ken*" dan "*si*", yang masing-masing dipimpin oleh "*Kentyoo*" dan "*Sityoo*". Pada tingkat yang lebih rendah, yaitu kawedanan, keasistenan, dan desa, digunakan istilah "*Gunson*" dan "*Ko*", dengan kepala daerahnya disebut "*Guntyoo*", "*Sotyoo*", dan "*Kutyoo*". Pengangkatan para pejabat tersebut dilakukan langsung oleh Pemerintah Jepang. Struktur ini menunjukkan upaya Jepang untuk mengatur pemerintahan di Indonesia dengan sistem yang terorganisir dan terpusat.[[41]](#footnote-41) Pada periode ini, seluruh kepala daerah ditunjuk secara langsung oleh pemerintah penjajah, tanpa melibatkan peran serta rakyat atau sistem pemilihan apapun, sehingga menghilangkan kedaulatan lokal dan kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Keputusan ini mencerminkan kekuasaan penuh yang dimiliki oleh pemerintah penjajah atas wilayah yang dikuasainya, sekaligus membatasi partisipasi politik masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

# Pada masa penjajahan, orientasi penjajah dalam menentukan kepala daerah di Indonesia tidak berlandaskan prinsip demokrasi seperti yang dikenal saat ini, melainkan bertujuan untuk memastikan kendali penuh atas wilayah-wilayah jajahan. Pada masa kolonial Belanda, kekuasaan dipusatkan di tangan gubernur jenderal sebagai penguasa tertinggi Hindia Belanda, dengan struktur pemerintahan yang sangat sentralistik. Di tingkat daerah, Belanda mempertahankan sistem tradisional dengan menunjuk pemimpin lokal seperti bupati atau kepala adat sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial. Penunjukan ini sepenuhnya berada di bawah kendali Belanda, sehingga kepala daerah tidak dipilih oleh rakyat melainkan ditentukan berdasarkan kesetiaan mereka kepada pemerintah kolonial. Di sisi lain, kewenangan kepala daerah sangat terbatas karena keputusan strategis tetap berada di tangan penguasa kolonial.

# Ketika Jepang menduduki Indonesia, orientasi mereka terhadap kepala daerah lebih berfokus pada mobilisasi sumber daya untuk mendukung perang Asia Pasifik. Sistem pemerintahan yang diterapkan berbentuk hierarki militer, di mana kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah Jepang. Pemimpin-pemimpin lokal yang dianggap loyal kepada Jepang diberi tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan pemerintah pendudukan, tetapi dalam kerangka yang sangat represif. Meskipun Jepang berusaha menarik dukungan rakyat dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal, keputusan tetap terpusat pada militer Jepang. Dalam kedua periode penjajahan ini, tidak dikenal konsep pemilihan kepala daerah secara demokratis, karena penguasa kolonial lebih mengutamakan pengendalian wilayah dan pengumpulan sumber daya daripada memberikan hak politik kepada rakyat.

# Pemerintahan kolonial menerapkan sistem yang berorientasi pada kepentingan ekonomi dan stabilitas politik untuk menjaga dominasi mereka atas daerah-daerah jajahan. Kepala daerah, seperti bupati atau residen, diangkat langsung oleh penguasa kolonial tanpa melibatkan masyarakat lokal dalam prosesnya. Pemilihan tersebut didasarkan pada kriteria yang mengutamakan loyalitas kepada pemerintah kolonial, kemampuan mengelola wilayah sesuai dengan kepentingan penjajah, dan kemudahan dalam menjalankan perintah dari pusat kolonial.

# Masyarakat tidak hanya kehilangan hak politik, tetapi juga kerap menjadi korban kebijakan eksploitatif yang memanfaatkan sumber daya manusia dan alam daerah setempat. Mereka hanya berperan sebagai objek kebijakan yang harus mematuhi aturan tanpa kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin maupun arah kebijakan. Sistem ini tidak hanya melanggengkan ketimpangan sosial dan ekonomi, tetapi juga menciptakan alienasi politik, di mana masyarakat tidak merasa memiliki kaitan dengan pemerintahan yang ada.

# Selain itu, penguasa kolonial menganggap partisipasi politik masyarakat sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan mereka. Setiap bentuk aspirasi atau protes yang muncul dari rakyat sering kali ditekan secara keras, sehingga demokrasi dalam bentuk apa pun menjadi sesuatu yang tidak mungkin berkembang pada masa itu. Kondisi ini berbeda secara signifikan dengan situasi pasca-kemerdekaan, di mana hak politik masyarakat mulai diakui dan diimplementasikan melalui mekanisme demokrasi, termasuk pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan demikian, pergeseran dari sistem otoriter kolonial ke sistem demokratis pasca-kemerdekaan menandai perubahan besar dalam struktur politik dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat di Indonesia.

# Setelah Kemerdekaan

# Pada awal masa kemerdekaan, kepala daerah masih dipilih dengan cara yang sama seperti saat era kolonial, yaitu melalui penunjukan atau pengangkatan yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat.[[42]](#footnote-42) Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah membentuk “UU No. 1 tahun 1945”. Undang-Undang ini adalah bentuk respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat yang sedang bergelora dan bersemangat menyelenggarakan pemerintahan sendiri (merdeka).[[43]](#footnote-43) Pasca kemerdekaan, orientasi sistem politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami berbagai perubahan seiring dengan perjalanan sejarah negara ini. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, semangat untuk membangun sistem politik yang demokratis mulai terlihat. Namun, tantangan dalam implementasinya cukup besar, terutama terkait koneksi antara pemerintah pusat dan daerah.

# Pada awal kemerdekaan, sistem politik yang diterapkan lebih bersifat sentralistik, dengan negara mengutamakan persatuan dan kesatuan setelah kemerdekaan. Pada masa ini, pemilihan kepala daerah belum sepenuhnya diberlakukan secara demokratis. Pemerintah pusat lebih banyak menunjuk kepala daerah untuk menghindari ketidakstabilan politik yang bisa mengancam integrasi wilayah-wilayah yang baru saja merdeka. Dalam periode ini, orientasi sistem politik lebih menekankan pada penguatan negara dan pembentukan struktur pemerintahan yang kuat untuk mengatasi tantangan pasca-kemerdekaan.

# Pada 1950, Undang-Undang Dasar 1945 berganti menjadi Undang-Undang Sementara (UUDS) 1950. Pada periode ini, hanya terjadi perubahan nama yang terbatas, di mana provinsi disebut sebagai daerah tingkat I, sementara kota atau kabupaten disebut sebagai daerah tingkat II. Begitu pula, tingkatan di bawahnya, yaitu kecamatan, disebut sebagai daerah tingkat III.[[44]](#footnote-44) Pada tahun 1959, UUDS 1950 kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden Soekarno.[[45]](#footnote-45) Hal tersebut berdampak pada berubahnya konstitusi dimana DPRD hanya dapat merekomendasikan nama. Keputusan finalnya ada di tangan Presiden dan Menteri Dalam Negeri (mendagri). Sistem ini masih terpusat dan belum mencerminkan pemilihan langsung oleh rakyat.

# Masa Orde Baru

# Proses pemilihan kepala daerah pada era Orde Baru (1966-1998) di Indonesia berlangsung melalui sistem yang dikenal sebagai sistem perwakilan semu. Pada sistem ini kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan intervensi besar dari pemerintah pusat. Pada era Orde Baru, regulasi yang mengakomodir sistem pemerintahan daerah, termasuk penunjukan kepala daerah, adalah “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah”. Undang-Undang ini memungkinkan pemerintah pusat untuk memiliki kontrol yang signifikan atas proses seleksi dan penetapan gubernur, bupati, atau wali kota, yang seringkali berasal dari kalangan militer, mencerminkan dominasi pemerintah pusat selama masa itu.

# Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, sentralisasi yang lebih ketat terjadi pada Pilkada. Dengan bantuan Menteri Dalam Negeri, pemerintah pusat memilih calon kepala daerah. Sistem ini meningkatkan otoritas pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.[[46]](#footnote-46) Dengan adanya keterlibatan Menteri Dalam Negeri, pemerintah pusat memiliki peran dalam proses pemilihan calon kepala daerah. Sistem ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah pusat untuk memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat daerah, sehingga memperkuat otoritas pusat terhadap pemerintahan daerah. Namun, sistem ini juga dapat memunculkan perdebatan terkait otonomi daerah, mengingat adanya potensi pengurangan independensi pemerintah daerah dalam menentukan pemimpinnya sendiri.

# Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki kendali yang sangat kuat. Selain itu, selama era Orba, mayoritas pemimpin daerah berasal dari kalangan militer. Jenderal menduduki jabatan gubernur, dan perwira menengah dapat menjabat sebagai bupati atau wali kota.[[47]](#footnote-47) Pola ini mencerminkan sentralisasi kekuasaan yang kuat, sekaligus menunjukkan dominasi militer dalam struktur pemerintahan sipil, yang berdampak “signifikan terhadap dinamika hubungan pusat-daerah serta pengembangan otonomi lokal.

# Era Reformasi

# Menurut “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah”, mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan melalui proses pemilihan yang hasilnya membuat kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD.[[48]](#footnote-48) Hal ini mencerminkan sistem pemerintahan yang menempatkan DPRD sebagai representasi rakyat di daerah sekaligus pemegang kekuasaan politik yang signifikan dalam menentukan kepemimpinan eksekutif di daerah. Mekanisme ini juga menunjukkan adanya prinsip pertanggungjawaban kepala daerah secara politik kepada DPRD, sehingga kepala daerah memiliki kewajiban untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan arahan dan pengawasan lembaga legislatif daerah tersebut. Namun, pola ini memberikan keterbatasan pada partisipasi langsung masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah, karena rakyat hanya berperan dalam memilih anggota DPRD yang kemudian bertindak sebagai pihak yang memilih kepala daerah. Sistem ini mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi lebih lanjut dalam rangka reformasi pemerintahan daerah.

# Desentralisasi mengacu pada proses pemindahan kewenangan serta tanggungan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.[[49]](#footnote-49) Konsep ini bermaksud untuk memberikan ruang yang lebih bebas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Dalam kerangka negara kesatuan seperti Indonesia, desentralisasi diatur untuk memperkuat kemandirian daerah tanpa menghilangkan prinsip kesatuan nasional. Selain itu, desentralisasi dianggap sebagai instrumen penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Proses ini juga mencakup aspek administratif, fiskal, dan politik, yang saling terkait dalam upaya menciptakan pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.

# Dari sudut pandang filsafat, munculnya gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari keinginan kuat untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah-daerah yang sedang berkembang. Diharapkan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung akan terpilih pemimpin yang dapat dipercaya dan mendapat dukungan dari masyarakat setempat.[[50]](#footnote-50) Cita-cita untuk merealisasikan pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas menjadi latar belakang ditetapkannya “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”. Melalui mekanisme ini, diharapkan masyarakat memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah, sehingga kepala daerah yang terpilih benar-benar merepresentasikan aspirasi dan kehendak rakyat. Dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004, telah terjadi perubahan pada konfigurasi dan model politik lokal, khususnya dari sistem keterwakilan menjadi sistem pemilihan langsung..[[51]](#footnote-51)

# Pada “Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah” dijelaskan bahwa, “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Pemilihan pasangan calon secara langsung oleh rakyat memberikan legitimasi politik yang lebih kuat dibandingkan dengan sistem sebelumnya, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dengan legitimasi ini, kepala daerah dan wakilnya diharapkan lebih bertanggung jawab langsung kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

# Pilkada secara langsung bertujuan untuk memperkuat legitimasi politik kepala daerah sekaligus mengurangi potensi intervensi politik dari legislatif daerah yang sebelumnya memiliki kewenangan penuh dalam pemilihan kepala daerah. Dengan diterapkannya pemilihan langsung, proses demokratisasi di tingkat lokal diharapkan dapat berjalan lebih transparan, kompetitif, dan partisipatif, meskipun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai tantangan seperti politik uang, tingginya biaya politik, dan dinamika konflik antar pendukung.

# Pilkada tahun 2005

# Pilkada pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005. Saat itu, sistem pemilihan kepala daerah sudah mendapatkan perbaikan. Pemilihan yang digelar pada Juni ini merupakan hasil dari diterapkannya “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”.[[52]](#footnote-52) Pilkada pertama di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada 2005 menandai era baru politik Indonesia, dengan rakyat berperan aktif memilih pemimpin daerah.[[53]](#footnote-53)

# Pemilihan langsung kepala daerah telah menjadi salah satu komponen utama dalam demokrasi Indonesia sejak diterapkannya mekanisme Pilkada untuk pertama kalinya. Melalui Pilkada, masyarakat diberikan hak dan kesempatan untuk secara langsung menentukan pemimpin daerah mereka, sehingga menciptakan mekanisme yang lebih transparan dalam proses demokrasi. Sistem ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan daerah, tetapi juga mendorong para pemimpin daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kinerja mereka selama menjabat.

# Dengan adanya hubungan langsung antara rakyat dan pemimpin yang terpilih, Pilkada turut meningkatkan akuntabilitas, memperkuat legitimasi pemerintah daerah, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Hal ini menjadikan Pilkada sebagai pilar penting dalam memperkuat demokrasi lokal dan membangun pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

# Pilkada serentak tahun 2015

# Pada tahun 2015, tepatnya di tanggal 9 Desember 2015, Indonesia menyelenggarakan pilkada secara serentak. Proses pemilihan kepala daerah dilakukan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama dimulai pada Februari 2017 untuk pejabat kepala daerah yang masa jabatannya berakhir antara Juli hingga Desember 2017. Gelombang kedua dimulai pada Juni 2018 untuk pejabat yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019.[[54]](#footnote-54)

# Keputusan untuk mengadakan Pilkada secara serentak dilatarbelakangi oleh adanya perubahan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu menyederhanakan proses demokrasi di tingkat daerah dengan menggabungkan pelaksanaan berbagai pemilihan yang sebelumnya terpisah-pisah ke dalam satu waktu pelaksanaan yang terintegrasi. Selain itu, kebijakan ini juga dirancang untuk mengurangi kejenuhan masyarakat akibat seringnya dilaksanakan pemilihan secara terpisah, sehingga partisipasi pemilih dapat lebih optimal dan beban anggaran negara menjadi lebih terkendali. Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada serentak bukan hanya merupakan inovasi teknis, tetapi juga bagian dari upaya sistematis dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

# Pilkada serentak berarti tanggal yang sama digunakan untuk pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.[[55]](#footnote-55) Pilkada serentak dilakukan untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Walikota. Pemimpin di tingkat lokal dipilih di waktu yang bersamaan di wilayah-wilayah Indonesia.

# Pilkada serentak dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu dan menyelaraskan masa jabatan kepala daerah sehingga proses pemerintahan dapat berjalan lebih terorganisir dan efektif.[[56]](#footnote-56) Pilkada serentak juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu, baik dari segi pembiayaan maupun pengelolaan sumber daya manusia, sehingga mengurangi beban anggaran negara dan daerah. Selain itu, mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal melalui penerapan sistem yang lebih teratur dan transparan, yang akan memungkinkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan fokus pada pelayanan publik.

# Perubahan ini dimulai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014”. Perppu ini menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, meskipun ada wacana untuk mengembalikan pemilihan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 kemudian menetapkan dasar hukum untuk pelaksanaan Pilkada serentak.

# Selanjutnya, pemerintah bersama DPR melakukan penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang menjadi dasar teknis pelaksanaan Pilkada serentak pertama. Pilkada serentak pada tahun tersebut merupakan momentum penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dengan melibatkan 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota sebagai wilayah penyelenggaraan.[[57]](#footnote-57)

# Tujuan dan fungsi pilkada

# Tujuan utama dari Pilkada adalah untuk memilih pemimpin yang memiliki visi, komitmen, dan kapabilitas untuk memberikan dampak positif dan kemajuan bagi daerahnya.[[58]](#footnote-58) Pemimpin yang dipilih melalui Pilkada diharapkan dapat membuat kebijakan yang inovatif, adil, dan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan mempersiapkan wilayah untuk menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, tujuan dari pilkada adalah untuk memilih pemimpin yang dapat memajukan bidang-bidang penting di daerah, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur, sambil mempertahankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Figur-figur ini diharapkan dapat mempertahankan stabilitas sosial-politik dan mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai kemajuan.

# Pilkada memiliki peran penting dalam sistem demokrasi Indonesia karena selain berfungsi sebagai proses pemilihan gubernur, mereka juga memiliki peran strategis untuk meningkatkan demokrasi lokal. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah, pilkada memberikan legitimasi politik kepada kepala daerah yang terpilih, yang dipilih berdasarkan suara rakyat. Pilkada juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, mengajarkan mereka hak-hak politik mereka dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan. Selain itu, fungsinya adalah sebagai mekanisme penyaringan kepemimpinan daerah untuk memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih memiliki kemampuan dan tujuan yang diperlukan untuk mengelola wilayahnya dengan efektif. Dengan demikian, Pilkada bukan hanya soal pergantian pemimpin, tetapi juga tentang memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi rakyat, dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

# Proses peralihan kekuasaan melalui pilkada bukanlah tujuan yang terakhir. Tujuan utama dari proses tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang damai dan saling menghormati di tengah perbedaan yang ada.[[59]](#footnote-59) Hal ini menunjukkan bahwa pilkada bukan hanya sekadar ajang politik untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai keberagaman. Dengan demikian, pilkada berperan penting dalam membangun iklim demokrasi yang sehat dan harmonis di tingkat daerah.

# Prinsip dasar pilkada

# Pemerintah merupakan wujud nyata dari aktivitas bernegara dalam melaksanakan fungsi kekuasaan, sehingga perlu memiliki legitimasi yang kuat sesuai dengan prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat.[[60]](#footnote-60) Pilkada harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memastikan integritas dan kualitas prosesnya. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan bagi penyelenggara, peserta, serta pemilih dalam menjalankan tugas dan perannya. Tanpa pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip tersebut, pilkada berisiko kehilangan tujuan utamanya sebagai wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam pilkada memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut demi terciptanya proses demokrasi yang adil dan bermartabat.

# Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) menyatakan bahwa, “pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil)”. Masing-masing dari asas tersebut memiliki makna tersendiri yang saling berkaitan sebagai representasi proses pemilihan yang demokrasi.

# Langsung

Pemilih harus memberikan suara mereka secara langsung tanpa melalui perantara atau diwakilkan oleh siapapun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap individu benar-benar menyuarakan kehendak pribadinya tanpa campur tangan pihak lain. Dengan demikian, keotentikan pilihan setiap pemilih dapat terjamin, sehingga proses pemilu mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang sejati. Selain itu, aturan ini juga menjadi salah satu cara untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi, sehingga hasil pemilu dapat diterima secara luas oleh masyarakat sebagai representasi yang sah dari kehendak kolektif.

Selain menjamin keotentikan pilihan, pemberian suara secara langsung juga mencegah potensi manipulasi atau intervensi yang dapat merugikan integritas pemilu. Jika pemilih diizinkan untuk memberikan suara melalui perantara, risiko penyalahgunaan mandat dan kecurangan akan meningkat, sehingga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu yang mewajibkan pemilih hadir secara fisik di tempat pemungutan suara tidak hanya merupakan mekanisme teknis, tetapi juga simbol komitmen untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam proses pemilu. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi hasil pemilu sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara.

1. Umum

Hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa diskriminasi diberikan kepada setiap warga negara yang berusia 17 tahun atau sudah menikah. Hak ini mencerminkan penghormatan terhadap prinsip kesetaraan dalam demokrasi, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan masa depan bangsa melalui pemilu. Kebebasan memilih juga dijamin tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, asal daerah, atau status sosial. Hal ini menegaskan komitmen negara terhadap prinsip egalitarianisme, yang tidak hanya melindungi hak politik individu tetapi juga memperkuat rasa persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hak memilih menjadi salah satu pilar penting yang mendukung keberlanjutan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

1. Bebas

Setiap warga negara memiliki hak bebas untuk memilih apa yang mereka inginkan tanpa terpengaruh oleh paksaan, tekanan, atau pengaruh luar. Kebebasan ini merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk menyuarakan kehendaknya tanpa adanya intimidasi atau manipulasi. Dengan memastikan bahwa setiap suara yang diberikan benar-benar mencerminkan kehendak pribadi, proses pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil, sehingga hasilnya dapat diterima sebagai representasi yang sah dari aspirasi masyarakat. Perlindungan terhadap kebebasan memilih juga mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak politik, yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun.

Selain melindungi kebebasan individu, prinsip ini juga berfungsi menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu secara keseluruhan. Pemilu yang bebas dari tekanan dan pengaruh luar memungkinkan terciptanya suasana demokrasi yang sehat dan kompetitif, di mana pilihan politik setiap individu didasarkan pada pertimbangan rasional dan kepentingan bersama. Dengan demikian, kebebasan memilih tidak hanya melibatkan hak pribadi, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun legitimasi pemerintah yang terpilih. Pemerintah yang lahir dari proses pemilu yang bebas dan adil memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan amanah rakyat dan mendorong stabilitas politik dalam jangka panjang.

1. Rahasia

Kerahasiaan hak suara setiap pemilih merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem pemilu yang demokratis. Prinsip ini memastikan bahwa pilihan politik setiap individu hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri, tanpa ada kewajiban untuk mengungkapkannya kepada pihak lain. Dengan demikian, setiap orang dapat merasa aman dan bebas dalam menentukan pilihannya tanpa rasa takut terhadap konsekuensi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Perlindungan ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, seperti bilik suara yang tertutup, tetapi juga mencakup upaya hukum dan pengawasan ketat untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap hak kerahasiaan pemilih.

Kerahasiaan suara memainkan peran penting dalam menjaga integritas demokrasi. Dengan melindungi keputusan politik individu dari pengawasan atau intervensi, prinsip ini membantu menciptakan iklim pemilu yang adil dan bebas. Hal ini juga menjadi upaya untuk mencegah intimidasi atau manipulasi yang dapat merugikan proses pemilu dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Ketika pemilih yakin bahwa suara mereka dijaga kerahasiaannya, partisipasi mereka dalam pemilu akan meningkat, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara kolektif. Prinsip ini, dengan demikian, menjadi pilar utama yang mendukung legitimasi pemerintahan yang terpilih.

1. Jujur

Sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran. Semua orang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bertindak dan berperilaku secara jujur selama pemilu; ini termasuk penyelenggara, pemerintah, partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu, pengawas, dan pemantau, serta individu lain yang memberikan kontribusi tidak langsung. Kejujuran dalam setiap tahapan pemilu adalah kunci untuk pemilu yang kredibel, transparan, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

1. Adil

Setiap pemilih dan partai politik berhak mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, serta dilindungi dari segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan hak politik mereka. Prinsip kesetaraan ini merupakan landasan utama dalam menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara bebas dan tanpa intimidasi dalam proses demokrasi.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, Pilkada diharapkan mampu menjamin hak politik warga negara, menciptakan persaingan yang setara, serta menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi kuat berdasarkan kehendak rakyat.

# Tinjauan umum tentang mekanisme penyelenggaraan pilkada

# KPU telah mengumumkan jadwal resmi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak, sebagaimana diatur dalam “PKPU Nomor 2 Tahun 2024” yang ditetapkan pada 26 Januari 2024.[[61]](#footnote-61) Di dalam peraturan tersebut sudah ditetapkan alur tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. “Tahapan terdiri atas tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Berikut jadwal dan tahapannya[[62]](#footnote-62) :

# Tahap Persiapan

# Perencanaan Program dan Anggaran. Terakhir pada Jumat 26 Januari 2024.

1. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan. Terakhir pada Senin, 18 November 2024.
2. Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan. Terakhir pada Senin, 18 November 2024.
3. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pilkada 2024. Rabu, 17 April 2024 - Selasa, 5 November 2024.
4. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan. Selasa, 27 Februari 2024 - Sabtu, 16, November 2024.
5. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih. Rabu, 24 April 2024 - Jumat, 31 Mei 2024.
6. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Jumat, 31 Mei 2024 - Senin, 23 September 2024.

# Tahap Penyelenggaraan

1. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. Minggu, 5 Mei 2024 - Senin, 19 Agustus 2024.
2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon. Sabtu, 24 Agustus 2024 - Senin, 26 Agustus 2024.
3. Pendaftaran Pasangan Calon. Selasa, 27 Agustus 2024 - Kamis, 29 Agustus 2024.
4. Penelitian Persaratan Calon. Selasa, 27 Agustus 2024 - Sabtu, 21 September 2024.
5. Penetapan Pasangan Calon. Minggu, 22 September.
6. Pelaksanaan Kampanye. Rabu, 25 September 2024 – Sabtu, 23 November 2024.
7. Pelaksanaan Pemungutan Suara. Rabu, 27 November 2024.
8. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara. Rabu, 27 November 2024.”

# Tinjauan umum tentang pasangan calon tuggal dalam pilkada

# Definisi Pasangan Calon Tunggal

# Pilkada dengan calon tunggal (kotak kosong) adalah pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon di daerah yang mengadakan pemilihan tersebut.[[63]](#footnote-63) Ketika pasangan calon lain tidak mendaftarkan diri atau tidak memenuhi persyaratan administrasi dan dukungan yang ditetapkan oleh KPU, hal ini terjadi. Dalam situasi seperti ini, pemilih harus memilih antara mendukung pasangan calon tunggal atau memilih kotak kosong untuk menolak calon saat ini.

# Pilkada dengan calon tunggal sering menimbulkan dinamika politik yang menarik dan menimbulkan banyak perdebatan tentang demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. Satu sisi, fenomena ini menunjukkan bahwa tidak ada persaingan dalam politik lokal. Ini dapat disebabkan oleh calon petahana yang dominan, kurangnya kandidat alternatif yang dianggap layak, atau hambatan bagi partai politik dan calon independen untuk mengusung kandidat. Sebaliknya, kotak kosong memungkinkan masyarakat untuk mengungkapkan sikap mereka sebagai cara untuk mengontrol calon yang maju, mempertahankan unsur demokrasi dalam pemilihan.

# Selain itu, pilkada calon tunggal memiliki konsekuensi hukum dan politik yang beragam, termasuk cara pemilihan dilakukan, legitimasi hasil pemilu, dan konsekuensi terhadap pemerintahan lokal. Pilkada dengan kandidat tunggal tidak hanya menunjukkan masalah kompetisi politik. Itu juga menunjukkan masalah tentang kualitas demokrasi, representasi masyarakat, dan partisipasi aktif dalam pemilihan pemimpin daerah.

# Sejarah munculnya pasangan calon tunggal dalam pilkada

# Munculnya pasangan calon tunggal dalam perhelatan pilkada di Indonesia berawal dari lahirnya Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015. Putusan ini merupakan konsekuensi hukum diterimanya permintaan uji materi terkait “Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang” pertanggal 29 September tahun 2015.[[64]](#footnote-64)

# Pilkada dengan calon tunggal dapat dilaksanakan setelah KPU berupaya secara maksimal untuk memenuhi ketentuan paling sedikit dua paslon sesuai dengan peraturan yang ada. Upaya tersebut mencakup pembukaan pendaftaran ulang, sosialisasi kepada partai politik atau gabungan partai politik, serta memastikan proses pencalonan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Jika seluruh langkah tersebut telah dilakukan namun tetap hanya terdapat satu pasangan calon, maka pilkada tetap dapat diselenggarakan dengan format calon tunggal.

# Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 merupakan tanggapan atas permohonan pengujian materi terhadap UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang diajukan oleh Effendi Gazali dan kawan-kawan. Permohonan tersebut diajukan karena undang-undang tersebut dinilai tidak memberikan solusi ketika syarat minimal dua pasangan calon tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan pilkada. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa penundaan pilkada akibat calon tunggal tidak dianggap sebagai penyelesaian masalah.[[65]](#footnote-65) Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materi terkait ketentuan yang mensyaratkan minimal dua pasangan calon dalam Pilkada. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa pilkada harus tetap dilaksanakan meskipun hanya ada satu pasangan calon. Langkah ini diambil untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat secara luas.

# Mekanisme adanya pasangan calon tunggal dalam pilkada juga tertuang dalam “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang”. Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan UU No. 10 Tahun 2016 mencerminkan upaya untuk menyesuaikan regulasi pemilihan dengan kondisi nyata di lapangan, sambil tetap melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia.

# Pada tahun 2015, tercatat ada 3 dari 269 daerah yang hanya memiliki pasangan calon tunggal, dengan peluang kemenangan hampir mencapai 100 persen. Pada Pilkada serentak tahun 2017, jumlah daerah dengan calon tunggal meningkat menjadi 9 dari 101 daerah. Kemudian, pada Pilkada tahun 2018, terdapat 16 dari 170 daerah yang hanya memiliki calon tunggal, di mana hanya Kota Makassar yang pasangan calon tunggalnya kalah oleh kotak kosong. Sementara itu, pada Pilkada tahun 2020, sebanyak 25 dari 270 daerah memiliki pasangan calon tunggal, dan seluruh pasangan calon tersebut berhasil memenangkan Pilkada dengan tingkat kemenangan mencapai 100 persen.[[66]](#footnote-66) Sedangkan di Pilkada tahun 2024 terdapat 37 pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong. Ada 2 daerah yang calon tunggalnya kalah dengan kotak kosong yaitu daerah Bangka dan Pangkal Pinang.

# Untuk menjamin proses pemilihan yang berkualitas, demokrasi yang sehat mengutamakan prinsip-prinsip seperti kebebasan memilih, keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif. Fenomena kotak kosong dapat menimbulkan kekhawatiran tentang seberapa baik sistem demokrasi dalam memberi rakyat pilihan yang layak. Ketidakterlibatan masyarakat atau kurangnya persaingan dalam pilkada dapat mengurangi legitimasi hasil pilkada dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik saat ini.[[67]](#footnote-67)

# Ketika masyarakat merasa tidak memiliki alternatif pilihan atau ketika hanya ada satu pasangan calon yang maju, proses demokrasi yang idealnya mencerminkan kehendak rakyat dapat tereduksi. Situasi ini tidak hanya menimbulkan kesan bahwa pilkada menjadi formalitas belaka, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada. Akibatnya, masyarakat cenderung skeptis terhadap efektivitas dan integritas pemimpin yang terpilih, serta menilai bahwa sistem politik tidak lagi mewakili aspirasi mereka secara utuh. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memengaruhi stabilitas dan kualitas demokrasi dalam jangka panjang.

1. Cucu Sutrisno, Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada, JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan), *2* (2), 2017 : 36.

   <https://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/509> [↑](#footnote-ref-1)
2. [Radio DMS 1027FM](https://radiodms.com/author/bakti2/), “Pengertian Pilkada Menurut Para Ahli 2024: Definisi Dan Maknanya”, *radiodms.com*, 22 Desember 2023,

   <https://radiodms.com/pengertian-pilkada-menurut-para-ahli-2024-definisi-dan-maknanya/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024, Pukul 9.44 WIB. [↑](#footnote-ref-2)
3. [Silvia Estefina Subitmele](https://www.liputan6.com/me/silvia.subitmele), “Begini Sejarah Pilkada di Indonesia, dari Era Pengangkatan Hingga Pemilihan Langsung”, *Liputan6.com*, Jakarta, 17 Juli 2024,

   <https://www.liputan6.com/hot/read/5645747/begini-sejarah-pilkada-di-indonesia-dari-era-pengangkatan-hingga-pemilihan-langsung>, diakses pada tanggal 30 September 2024 Pukul 10.18 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. Annisa, “Sejarah Pilkada Serentak di Indonesia dari Masa ke Masa”, 29 Agustus 2024,

   <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-pilkada-serentak-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, diakses pada tanggal 30 September 2024 Pukul 11.10 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tjenreng, Z. B, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak,* Depok : Papas Sinar Sinanti, 2020, hlm. 8. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1003/1/Demokrasi%20di%20Indonesia%20Melalui%20Pilkada%20Serentak%20(Papas%20Sinar%20Sinanti%20ISBN%20978-602-1374-52-8).pdf>, [↑](#footnote-ref-5)
6. Robi Ardianto, “Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Meningkat, Abhan: Menarik Dijadikan Penelitian”, *bawaslu.go.id*, Jakarta, 17 Maret 2021,

   <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/fenomena-calon-tunggal-dalam-pilkada-meningkat-abhan-menarik-dijadikan-penelitian> , diakses pada tanggal 30 September 2024 Pukul 19.40 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kanya Anindita Mutiarasari, “Aturan Kotak Kosong dalam Pilkada 2024, Cek Penjelasannya!”, detikNews, Jakarta, 29 September 2024.

   <https://news.detik.com/pilkada/d-7563627/aturan-kotak-kosong-dalam-pilkada-2024-cek-penjelasannya>, diakses pada tanggal 30 September 2024 Pukul 20.07 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. Diana Dwi Aprilianti*, et al,* Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum, *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum*, 6 (1), 2024, hlm 23.

   <https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/127/79> [↑](#footnote-ref-8)
9. Imam Suripto, “Protes Calon Tunggal, Massa Pro Kotak Kosong Geruduk KPU Brebes”, *detikjateng*, Brebes, 23 September 2024.

   <https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7553709/protes-calon-tunggal-massa-pro-kotak-kosong-geruduk-kpu-brebes>, diakses pada 9 Oktober 2024 Pukul 20.12 WIB.  
    [↑](#footnote-ref-9)
10. Rofi Aulia Rahman, *et a*l., Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi*, 19 (1), 2022, hlm. 48-72.

    <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1913/pdf> [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Rizki Ramadhani, Kaderisasi Partai Politik untuk Diajukan Calon Legislatif, *Journal UII*,  [1 (4), 2023](https://journal.uii.ac.id/psha/issue/view/1847), hlm. 174-183.

    <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/32504/16355> [↑](#footnote-ref-11)
12. Versilia Anggraini, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020)”, Skripsi Sarjana Hukum, Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021, hal 66-67.

    <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7616/1/versilia%20cd.pdf> [↑](#footnote-ref-12)
13. Apriadi, “Problematika Kotak Kosong Pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Indonesia”, Tesis Magister Hukum, Tarakan : Universitas Borneo Tarakan, 2023, hlm 138.

    <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT19-02-2024-093005.pdf> [↑](#footnote-ref-13)
14. Ahmad Yantomi, Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No.1, Desember 2021, hlm. 24.

    <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/download/4524/2898> [↑](#footnote-ref-14)
15. Achmad Irwan Hamzani, *et.al., Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal,* Tegal : t.p, 2023, hlm. 3-4 [↑](#footnote-ref-15)
16. Zuhcri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif,* Makassar : Syakir Media Press, 2021, Cet. ke-1, hlm. 6.

    <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/8793/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf> [↑](#footnote-ref-16)
17. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, 8 ed,

    <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=49216&lokasi=lokal>. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, Cet. Ke-1, hlm. 56.

    <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf> [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid., hlm 57. [↑](#footnote-ref-19)
20. Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura, *Jurnal Ekonomi,* 21 (3), 2019, hlm. 4.

    <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608> [↑](#footnote-ref-20)
21. Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif,* Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, hlm. 51. <http://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf> [↑](#footnote-ref-21)
22. H.P. Penggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Terbitan Ke-1, Bandung : Penerbit Alumni, 2023, hlm. 171.

    <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=MM3LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hp+panggabean&ots=wVSMIS7RQd&sig=K3CaemUtP8HZvgc87NsI1KJcwro> [↑](#footnote-ref-22)
23. Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian,* Banjarmasin : Antasari Press, 2011, hlm. 84. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf> [↑](#footnote-ref-23)
24. Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron*, op.cit*., hlm 19. [↑](#footnote-ref-24)
25. Baiq Sidni Cahyati, *et.al*., Menjadi Generasi Maju dengan Memahami Demokrasi, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Konteks Indonesia, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9 (1), 2024, hlm. 688.

    <https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/1192/1300> [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
27. Gabriana Akhira Malik, *et.al.,* Penerapan Demokrasi Berkeadaban Dalam Kebudayaan Dan Tradisi Suku Bugis*, Jurnal Kewarganegaraan*, 5 (2), 2021, hlm. 702.

    <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/1987/pdf/4841> [↑](#footnote-ref-27)
28. Tri Indriawati, Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli, Kompas.com, 15 September 2022,

    <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/15/080000879/pengertian-demokrasi-pancasila-menurut-para-ahli>, diakses pada 12 November 2024 Pukul 05.33 WIB. [↑](#footnote-ref-28)
29. Fajlurrahman Jurdi*, Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke-1, hlm. 1.

    <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=N8NoDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=definisi+pemilu&ots=_wfgkNYhGI&sig=ixZMuZsbqWVRxC80rjIJQExOr4A&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi%20pemilu&f=false> [↑](#footnote-ref-29)
30. Patrick Pinaria, Mengenal 3 Sistem Pemilihan Umum di Dunia, *MetroTVnews.com*, Jakarta, 1 Juni 2023,

    <https://www.metrotvnews.com/read/b1oC8noM-mengenal-3-sistem-pemilihan-umum-di-dunia>, diakses pada 12 November 2024 Pukul 06.00 WIB. [↑](#footnote-ref-30)
31. Kholida Qothrunnada, Jenis Sistem Pemilu di Dunia dan yang Digunakan Indonesia, *detikNews*, Jakarta, 12 Januari 2024,

    <https://news.detik.com/pemilu/d-7138970/jenis-sistem-pemilu-di-dunia-dan-yang-digunakan-indonesia>, diakses pada 12 November 2024 Pukul 06.17 WIB. [↑](#footnote-ref-31)
32. Widhia Arum Wibawana, Arti Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Sejarahnya di Indonesia, detikNews, Jakarta, 15 Juni 2023,

    <https://news.detik.com/pemilu/d-6774595/arti-sistem-pemilu-proporsional-terbuka-dan-sejarahnya-di-indonesia>, diakses pada 12 November 2024 Pukul 06.33 WIB. [↑](#footnote-ref-32)
33. Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015, hlm. 270. [↑](#footnote-ref-33)
34. Kanya Anindita Mutiarasari, Perbedaan Pemilu dan Pilkada: Pengertian dan Sistem Pelaksanaannya, *detikNews*, Jakarta, 2 Februari 2023,   
    <https://news.detik.com/pemilu/d-6547496/perbedaan-pemilu-dan-pilkada-pengertian-dan-sistem-pelaksanaannya>, diakses pada 12 November 2024 Pukul 08.44 WIB. [↑](#footnote-ref-34)
35. Chakim, M. Lutfi, Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.1 (2014): hlm 114. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/60> [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid*., hlm. 117. [↑](#footnote-ref-36)
37. Nikita Rosa, “Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, dari Masa Penjajahan sampai Reformasi”, *detikEdu*, Jakarta, 21 September 2022,

    <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6303020/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia-dari-masa-penjajahan-sampai-reformasi>, diakses pada 12 November 2024 Pukul 09.17 WIB. [↑](#footnote-ref-37)
38. Muhammad Arief Hidayat, “Evolusi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, VIVAnews, 27 September 2014,

    <https://www.viva.co.id/berita/politik/542375-evolusi-sistem-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia>, diakses pada 12 November 2024 Pukul 09.33 WIB. [↑](#footnote-ref-38)
39. Duma Lumban Gaol dan Reka Seprina, KETATANEGARAAN INDONESIA DIBAWAH MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945), *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi,* 3 (1), 2023 : 186-202.

    <https://online-journal.unja.ac.id/krinok> [↑](#footnote-ref-39)
40. Farkhani, Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung Dalam Perspektif Pegiat Dan Pelaksana Pemilu, *Yustia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5 (2), 2019: 1111-1118.

    <https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/download/42/48> [↑](#footnote-ref-40)
41. Bungasan Hutapea, Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, 4 (1), 2015: 1-179.

    <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/136> [↑](#footnote-ref-41)
42. Farkhani, *op.cit*., hal. 113. [↑](#footnote-ref-42)
43. Hanif Nurcholis, Sejarah Pemerintahan Lokal/Daerah di Indonesia, hlm. 34.

    <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MAPU5204-M1.pdf> [↑](#footnote-ref-43)
44. Aswab Nanda Pratama dan Inggried Dwi Wedhaswary, “Riwayat Pilkada di Indonesia”, *Kompas.com*, 27 Juni 2018,

    <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/27/06000041/riwayat-pilkada-di-indonesia?page=all>, diakses pada 12 November Pukul 13.05 WIB. [↑](#footnote-ref-44)
45. Serafica Gischa, “Latar Belakang Terbentuknya UUD Sementara 1950”, *Kompas.com*, 18 Agustus 2020,

    <https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/18/140350169/latar-belakang-terbentuknya-uud-sementara-1950>, diakses pada 12 November 2024 Pukul 13.20 WIB. [↑](#footnote-ref-45)
46. Octavia Kusuma, “Sejarah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia”, *Kawula17,* 23 Oktober 2024,

    <https://kawula17.id/artikel/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-pilkada-di-indonesia>, diakses pada 12 November 2024 Pukul 18.45 WIB. [↑](#footnote-ref-46)
47. Mustakim dan Rifki Arsilan Eduward Ambarita Anwar Sadat, “Pilkada ala orba”, *Viva.co.id*, 30 November 2019,   
    <https://www.viva.co.id/indepth/sorot/1248750-pilkada-ala-orba>, diakses pada 12 November 2024 Pukul 18.50. [↑](#footnote-ref-47)
48. Wiredarme, *Konfigurasi Politik Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Sistem Demokrasi Di Indonesia*, Mataram : Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), 2019, hlm. 70. [↑](#footnote-ref-48)
49. Saskia Pratiwi Danda, *et.al.,* Desentralisasi Dan Pemerintahan Lokal (Pengembangan Literatur Dalam Bidang Administrasi Negara), *JUMEA,* 1 (1), 2023, hlm. 54.

    <https://merwinspy.org/journal/index.php/jumea/article/view/27/21> [↑](#footnote-ref-49)
50. Parbuntian Sinaga, Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi Uud Nri 1945, *Binamulia Hukum,* 7 (1), 2018, hlm. 21.

    <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/311/66> [↑](#footnote-ref-50)
51. Ihsan Hamid, Urgensitas Uu No. 32 Tahun 2004 Terhadap Pilkada Serta Implikasinya Dalam Perubahan Sosial Kemasyarakatan (Tinjauan Terhadap Pilkada Ntb Tahun 2008), *Politea: Jurnal Politik Islam,* 1 (2), 2018, hlm. 169-203.

    <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/820/460> [↑](#footnote-ref-51)
52. Anonim, “Pilkada Pertama Kali Dilakukan pada Tahun 2005, Berikut Sejarahnya”, 11 Juli 2024, *Merdeka.com*, 11 Juli 2024,

    <https://www.merdeka.com/amp/sumut/pilkada-pertama-kali-dilakukan-pada-tahun-2005-berikut-sejarahnya-162481-mvk.html>, diakses pada 12 November 2024 Pukul 20.20 WIB. [↑](#footnote-ref-52)
53. Mabruri Pudyas Salim, “Pilkada Pertama Kali Dilakukan pada Tahun? Simak Sejarahnya”, *Liputan6.com*, 11 juli 2024,

    <https://www.liputan6.com/hot/read/5639079/pilkada-pertama-kali-dilakukan-pada-tahun-simak-sejarahnya>, diakses pada 12 November 2024 Pukul 20.43 WIB. [↑](#footnote-ref-53)
54. “Pelaksanaan Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2015”, *hukumonline.com*, 13 April 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-pilkada-serentak-digelar-9-desember-2015-lt552b941df0c5f/>, diakses pada 12 November 2024 Pukul 20.52 WIB. [↑](#footnote-ref-54)
55. Oktafia Kusuma, “Apa Itu Pilkada Serentak 2024? Penjelasan dan Proses Pelaksanaannya”, *Kawula17*, 30 September 2024,

    <https://kawula17.id/artikel/apa-itu-pilkada-serentak-2024-penjelasan-dan-proses-pelaksanaannya>, diakses pada 15 November 2024 Pukul 19.11 WIB. [↑](#footnote-ref-55)
56. Anonim, “Apa Itu Pilkada Serentak? Ini Pengertian dan Tata Caranya”, *Kumparan.com*, 4 Oktober 2024,

    <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/apa-itu-pilkada-serentak-ini-pengertian-dan-tata-caranya-23e4UcmAXw6>, diakses pada 15 November 2024 Pukul 19.46 WIB. [↑](#footnote-ref-56)
57. Andrean W. Finaka, “Pilkada Serentak di Indonesia Masa ke Masa”, *Indonesiabaik.id*, 18 Juli 2024,

    <https://indonesiabaik.id/infografis/pilkada-serentak-di-indonesia-masa-ke-masa>, diakses pada 15 November 2024 Pukul 20.05 WIB. [↑](#footnote-ref-57)
58. Anonim, “Pilkada Singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, Berikut Tujuan dan Penjelasannya”, *merdeka.com*, 15 Juli 2024,

    <https://www.merdeka.com/sumut/pilkada-singkatan-dari-pemilihan-kepala-daerah-berikut-tujuan-dan-penjelasannya-163934-mvk.html?page=2>, diakses pada 15 November 2024 Pukul 21.00 WIB. [↑](#footnote-ref-58)
59. Prof. Muhammad: Tujuan Pilkada Hidup Damai Dan Saling Menghargai Perbedaan, *dkpp.go.id*, 20 Oktober 2020,

    <https://dkpp.go.id/prof-muhammad-tujuan-pilkada-hidup-damai-dan-saling-menghargai-perbedaan/>, diakses pada 15 November 2024 Pukul 21.05 WIB. [↑](#footnote-ref-59)
60. Sukitman Asgar, Partisipasi Politik Masyarakat PadaPemilu danPilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah, *Innovative: Journal Of Social Science Research,* 3 (3), 2023, hlm. 5982-5994,

    <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2802/1996> [↑](#footnote-ref-60)
61. Widhia Arum Wibawana, “Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak 2024 Sesuai Peraturan KPU”, *detiknews.com*, 4 Februari 2024,

    <https://news.detik.com/pemilu/d-7176463/tahapan-dan-jadwal-pilkada-serentak-2024-sesuai-peraturan-kpu>, diakses pada 20 November 2024 Pukul 18.34 WIB. [↑](#footnote-ref-61)
62. PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. [↑](#footnote-ref-62)
63. Maringan Panjaitan dan Simson Berkat Hulu, Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya

    Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020, *JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik,* 1 (2), 2021, hlm. 120.

    <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik/article/view/411> [↑](#footnote-ref-63)
64. Teguh Ilham, Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah,* 12 (2), 2020, hlm.66.

    <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/1359> [↑](#footnote-ref-64)
65. Mohammad Syafei, Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No : 100/Puu-Xiii/2015tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, *Legal Opinion,* 4 (5), 2016, hlm. 7.

    <https://media.neliti.com/media/publications/149848-ID-tinjauan-atas-putusan-mahkamah-konstitus.pdf> [↑](#footnote-ref-65)
66. Anonim, “Fenomena Calon Tunggal Meningkat dari Pilkada ke Pilkada, Ini Bahayanya”, *tempo.co*, Jakarta, 24 Agustus 2024,

    <https://www.tempo.co/pemilu/fenomena-calon-tunggal-meningkat-dari-pilkada-ke-pilkada-ini-bahayanya-16350>, diakses pada 2 Desember 2024 Pukul 20.11 WIB. [↑](#footnote-ref-66)
67. Rio Andrian, et.al., Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada 2024 Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik,* 2 (1), 2024, Hlm. 723.

    <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/508/507> [↑](#footnote-ref-67)